



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG**

**NOMOR 242 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD  
KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-104/MK.06/KNL.0705/2024 tanggal 4 Juli 2024 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, perlu ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan karena sebab-sebab lain pada Lembaga Kebijakan Pengadaan BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan karena sebab-sebab lain sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu untuk 15 (lima belas) NUP Aset Tak Berwujud senilai Rp5.265.166.937,- (lima miliar

dua ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

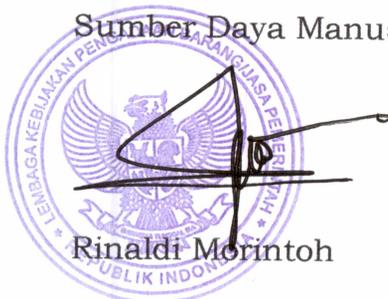
HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD  
DALAM Pengerjaan karena sebab-sebab lain  
pada Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

NOMOR : 242 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Agustus 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN  
KARENA SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL PERSETUJUAN HAPUS	JUM LAH	SK Persetujuan Hapus	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN	
<b>I. SOFTWARE KOMPUTER</b>											
1	8.01.01.0	Software	1 Paket Software	49	31 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 476.320.146	Rp -	
2	8.01.01.0	Software	Lisensi, Instal,	51	14 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 439.890.000	Rp -	
3	8.01.01.0	Software	Modul Aplikasi SIB	278	23 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 198.000.000	Rp -	
4	8.01.01.0	Software	Modul Aplikasi SIB	279	23 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 198.000.000	Rp -	
5	8.01.01.0	Software	Modul Aplikasi SIB	280	23 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 198.000.000	Rp -	
6	8.01.01.0	Software	E PURCHASING V.2	339	23 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 576.069.000	Rp -	
7	8.01.01.0	Software	MONITORING	362	31 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 421.300.000	Rp -	
8	8.01.01.0	Software	VMS	379	31 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 453.250.000	Rp -	
9	8.01.01.0	Software	e-pengadaan langsung	380	31 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 253.000.000	Rp -	
10	8.01.01.0	Software	Sistem Informasi Unit	413	30 Juni 2015	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 153.761.391	Rp -	
11	8.01.01.0	Software	SPSE ICB	446	30 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 203.472.000	Rp -	
12	8.01.01.0	Software	SPSE Helpdesk	448	30 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 101.736.000	Rp -	

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL PERSETUJUAN HAPUS	JUM LAH	SK Persetujuan Hapus	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
13	8.01.01.0	Software	VMS	455	30 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 171.954.000	Rp -
14	8.01.01.0	Software	e-learning	539	31 Desember	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 1.100.424.400	Rp -
15	8.01.01.0	Lisensi	Linkproof Load	377	31 Juli 2015	4 Juli 2024	1	S-104/MK.6/KNL.0705/2024	Rp 319.990.000	Rp -
<b>TOTAL</b>									<b>Rp 5.265.166.937</b>	<b>Rp -</b>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI